

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

1. Sejarah Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun 1674, Keraton Mataram, Yogyakarta diserang oleh Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makasar yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada Keraton dan terdesaknya Amangkurat I dengan melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda, hingga pada saat itu meninggal di Tegal dalam pelariannya. Untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo, pada tahun 1677 keraton Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat II yang merupakan putra mahkota dari Amangkurat I meminta Bupati Ponorogo untuk mendapatkan penjagaan keraton oleh pasukan Warok yang terkenal pandai dalam berperang dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo.

Setelah dijaganya keraton Mataram oleh para pasukan Warok dari Ponorogo, Tronojoyo kesulitan menembus keraton dan ditangkap serta dijatuhi hukuman mati pada tahun 1679. Para pasukan Warok yang berhasil menjaga Keraton mendapat hadiah tempat tinggal di sebelah barat keraton untuk memudahkan penjagaan keraton ketika terjadi penyerangan terhadap keraton. Daerah tersebut diberi nama Kulon Ponorogo yang hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo yang berarti Keraton Mataram sebelah Barat Ponorogo.

Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini

digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. Kabupaten ini terdiri dari 88 desa dan kelurahan, serta 937 Pedukuhan dengan luas wilayah 586,27 km².

Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk paling sedikit kedua dari lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 417.473 jiwa. Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berada di Kecamatan Wates yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat ibu kota Provinsi DIY. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota di Provinsi DIY yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Barat	: Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Timur	: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi DIY
Utara	: Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Selatan	: Samudera Hindia

3. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;

- b. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram;
- d. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

B. Gambaran Umum Gerakan Bela Beli Kulon Progo

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi yang dimiliki masyarakat Kulon Progo. Ada beberapa program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mempromosikan produk – produk unggulan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Toko Milik Rakyat (ToMiRa)

Berdirinya Toko Milik Rakyat (ToMiRa) pada awalnya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2011 yang mengatur mengenai kebijakan pengelolaan toko modern khususnya melarang berdirinya toko modern berjejaring dalam radius 1000 meter dari jarak pasar tradisional. Sehingga pada awal berdirinya ToMiRa ini sebenarnya bukan merupakan sebuah konsep yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah daerah melainkan sebuah efek samping dari berlakunya Perda No. 11 Tahun 2011.

“Dengan merujuk pada Perda No. 11 tahun 2011 mengenai perlindungan jarak kurang dari 1000 meter dengan pasar tradisional yang ditujukan kepada Toko Modern. Jika Toko Modern tersebut melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut maka akan kami tutup Toko nya atau take over oleh koperasi menjadi ToMiRa” (wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

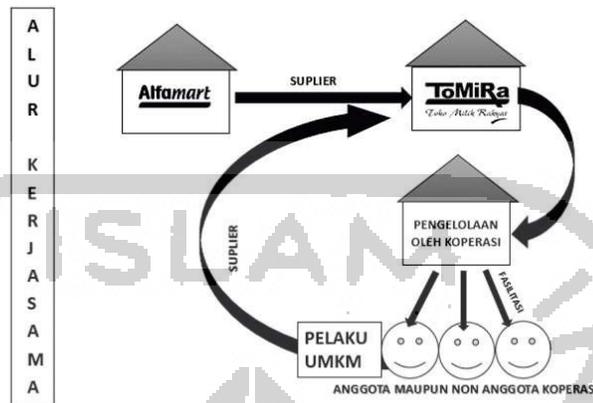
Pada awalnya dari para pihak pengelola toko modern yang diantaranya ada Alfamart dan Indomaret sangat keberatan jika harus menutup toko

modern milik mereka. Selanjutnya, ada audiensi dari pihak toko modern dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Audiensi tersebut membahas mengenai implementasi dari Perda No. 11 Tahun 2011 yang isinya bukan mengharuskan untuk ditutup, akan tetapi dalam peraturannya tidak diperbolehkan adanya toko berjejaring atau waralaba dalam radius 1000 meter dari pasar tradisional.

Hasil dari audiensi dan rapat koordinasi dengan berbagai pihak menghasilkan kesepakatan, toko modern yang sebelumnya melanggar dianjurkan untuk dibeli kepemilikannya oleh pihak koperasi untuk diambil alih menjadi ToMiRa dengan cara dibeli.

“ToMiRa secara legal dimiliki oleh Koperasi, namun Koperasi belum mampu mengoperasikan ToMiRa karena keterbatasan sumber daya manusia dan modal yang masih terbatas. Jadi hanya sebatas kemitraan antara koperasi dengan Alfamart maupun Indomaret”
(wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

Akhirnya setelah melakukan berbagai tahap koordinasi untuk pendirian ToMiRa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Alfamart pada tanggal 1 November 2014 dengan peresmian pendirian 3 gerai ToMiRa. Selanjutnya, pihak pemerintah menjalin kerjasama serupa dengan pihak Indomaret pada tanggal 23 Agustus 2016.



Gambar 4.1 Alur Kerjasama ToMiRa dengan Alfamart atau Indomaret

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo 2016

Sistem kerjasama ToMiRa dengan Alfamart atau Indomaret menggunakan sistem kerjasama kemitraan dengan pola perdagangan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 26 Huruf d. Bentuk kerjasamanya yaitu sesuai dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 30 yaitu dilakukan dengan bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan penerimaan pasokan UMKM dari usaha besar.

Dalam kasus ToMiRa dengan Alfamart atau Indomaret, pemasaran dilakukan dengan proses pembelian secara angsur dari keuntungan ToMiRa. Sedangkan, bentuk kerjasama untuk penyediaan lokasi usaha sudah termasuk dengan pembelian Alfamart atau Indomaret yang dijadikan ToMiRa, dikarenakan lokasi toko yang akan diambil alih oleh ToMiRa adalah toko yang sudah dibangun di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, bentuk kerjasama untuk penerimaan pasokan UMKM dari pemasok produk lokal UMKM Kulon Progo, PDAM produk Air-Ku, Gapoktan produk Beras Daerah, dan UMKM besar seperti Alfamart dan Indomaret.

Pemerintah Daerah Kulon Progo akan terus mengembangkan kesepakatan dengan Indomart atau Alfamart melalui revisi Perda No 11 Tahun 2011. Sehingga nantinya semua Toko Modern berjejaring di Kulon Progo menjadi ToMiRa.

“Makin tahun makin bertambah jumlah ToMiRa, Tahun 2020 nanti ada draft revisi mengenai Perda No. 11 tahun 2011 yang sebelumnya melarang berdirinya toko modern dengan jarak 1000 meter diganti dengan jaraknya yang dihilangkan sehingga nantinya tidak ada toko modern yang lain dan yg ada hanya tomira” (wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

2. Program Motif Batik Geblek Renteng

Motif Batik Geblek Renteng lahir atas keprihatinan Bupati Kulon Progo pada tahun 2012 terkait dengan industri batik di Kecamatan Lendah yang telah lama menjadi sentra industri batik, namun keberadaannya belum begitu berpengaruh pada tingkat lokal apalagi nasional. Maka dari permasalahan tersebut diperlukan strategi untuk mengangkat kembali industri batik di Kecamatan Lendah, dibuatlah acara dalam bentuk lomba yang akan menentukan motif batik khas Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk desain pada tahun 2012 (Lendah, 2019). Tujuan utama diselenggarakan lomba desain motif batik khas Kabupaten adalah:

- a. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya batik.
- b. Menggali ide kreatifitas dan apresiasi masyarakat dalam merancang motif batik.
- c. Meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya batik.
- d. Menciptakan corak ragam batik baru dengan motif khas Kabupaten Kulon Progo sebagai jati diri batik Kulon Progo.
- e. Meningkatkan promosi batik, memajukan industry batik di Kulon Progo, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lomba ini diikuti oleh 304 peserta dari berbagai daerah dan menghasilkan 392 karya desain motif batik. Berdasarkan dari penilaian oleh dewan juri ada beberapa nominasi desain batik antara lain dengan judul: Kulon Progo Binangun, Angguk Putri, Manggis, Ceplok Kulon Progo, dan Geblek Renteng. Dari beberapa desain tersebut terpilihlah “Geblek Renteng” sebagai nominator terbaik motif batik khas Kulon Progo, dan diumumkan secara resmi melalui berbagai media pada tanggal 6 Mei 2012.

Mulai saat itu Motif Batik Geblek Renteng diperkenalkan, disosialisasikan, diproduksi, dan dipasarkan kepada masyarakat luas serta dijadikan motif asli khas Kulon Progo dan merupakan ikon Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan penggunaan Batik Geblek Renteng tertera dalam Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 025/2171 tanggal 2 Juli 2012 mengenai Penggunaan Pakaian Batik Motif Geblek Renteng.

Pada tahapan pertama, Batik Motif Geblek Renteng diwajibkan untuk dipakai pada seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Siswa Sekolah dari jenjang SD – SMA. Dampaknya dengan adanya kebijakan tersebut membuat industri batik di Kecamatan Lendah mulai meningkat. Saat ini motif batik geblek renteng sudah dikenal masyarakat secara luas, baik itu di tingkat lokal, nasional, dan sampai ke pasar Internasional.

3. Program Beras Daerah (Rasda) dan Beras PNS

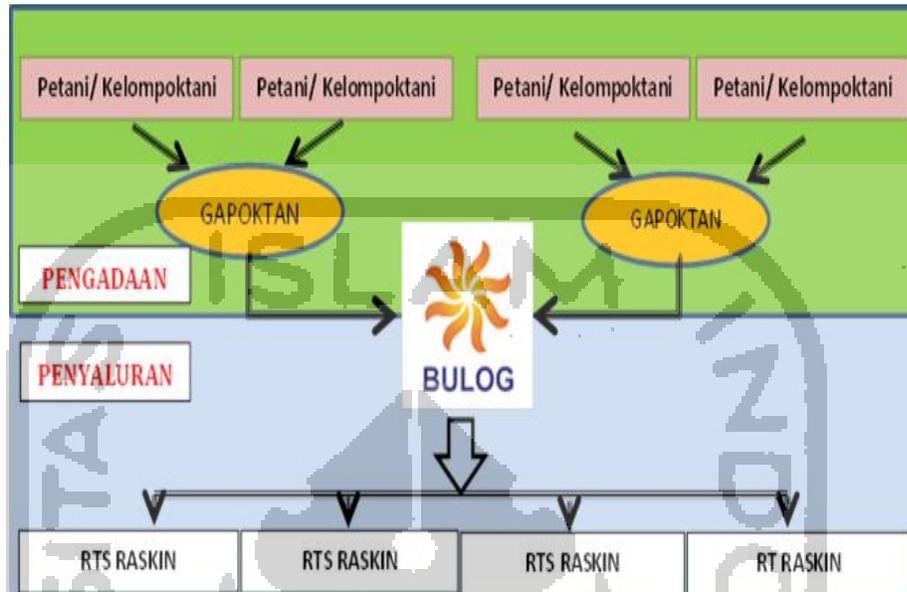
Kebijakan Beras Daerah (Rasda) bermula dari permasalahan kondisi beras Raskin (Beras diterima keluarga miskin) yang berasnya berwarna kusam, berkutu, dan berbau. Pada saat itu Bupati Kulon Progo Pak Hasto Wardoyo melihat potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo khususnya beras daerah yang selalu surplus produksinya.

“Jika gabah rata-rata memproduksi bisa sampai 120 ribu ton kalo di konversi jadi beras bisa sampai 75-80 ribu ton beras. Kebutuhan konsumsi bagi masyarakat kulon progo hanya 35-38 ribu ton beras,

secara terlihat bisa disimpulkan bahwa beras daerah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kulon progo dan bahkan berasnya sampai surplus” (wawancara dengan Retno Setyaningsih, 27 November 2019).

Atas dasar ini, Bupati Kulon Progo mengajukan pergantian produk beras luar negeri dengan beras lokal hasil dari petani Kulon Progo kepada Badan Umum Logistik (Bulog) sebagai penyedia Raskin. Setelah dua tahun bernegosiasi antara pihak pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Bulog DIY. Pada akhirnya, ada penandatanganan kerjasama dalam rangka pengadaan beras daerah, khususnya Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Kulon Progo dari produksi petani Kulon Progo melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan Bulog DIY.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MOU Nomor 501/7496 dan MOU-01/12000/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, dari MOU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kesanggupan pengadaan beras miskin antara Gapoktan dengan Kepala Bulog DIY pada tanggal 27 Januari 2014. Rasda menggantikan Raskin, mulai bulan April 2014 telah mendistribusikan sejumlah 1.290 ton beras untuk masyarakat miskin yang berasnya berasal dari Gapoktan Kulon Progo.



Gambar 4.2 Skema Kerja Beras Daerah (Rasda)

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 2018

Pada gambar diatas merupakan skema kerja Rasda yang pengadaan berasnya dilakukan oleh Gapoktan Kulon Progo, kemudian Gapoktan menyalurkan ke Bulog. Setelah beras didistribusikan ke Bulog oleh Gapoktan, maka selanjutnya Bulog akan menyalurkan Rasda ke Rumah Tangga Sasaran (RTS Raskin) Kabupaten Kulon Progo. Hasil pendapatan dari pengadaan beras yang diproduksi oleh Gapoktan berasa dari Bulog dengan harga yang sesuai dengan harga pasar pada saat itu.

Selain program Raskin menjadi Rasda, ada juga program “Bela Beli Beras PNS” yang berasnya berasal dari Gapoktan Kulon Progo. Program Beras PNS ini mewujudkan bantuan pangan bagi petani yang memposisikan sebagai produsen dan PNS sebagai konsumen. Pada Surat Edaran Bupati Kulon Progo disebutkan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani, maka seluruh PNS di Kabupaten Kulon Progo dihimbau untuk membeli beras “SEHAT” yang diproduksi oleh Gapoktan Kulon Progo.

“Beras ini dikemas dengan ukuran 5 kg dan masing – masing PNS di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dihimbau oleh Bupati untuk membeli beras sebanyak 5 kg / bulan” (wawancara dengan Retno Setyaningsih, 27 November 2019).

Program Rasda dan Program “Bela Beli Beras PNS” memberikan efek positif berupa jaminan peningkatan kualitas beras yang disediakan serta kepastian harga produksi yang sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP), dan meningkatkan jam kerja petani dalam mengolah hasil produksi. Perputaran uang di daerah akan mengembangkan ekonomi lokal, sehingga akan meningkatkan pendapatan petani dan dapat menurunkan angka kemiskinan.

“Bela Beli Kulon Progo” dalam konteks pertanian dan pangan telah dideklarasikan bersama antara Pemerintah, masyarakat Kulon Progo, dan pemangku kepentingan lainnya melalui gerakan *“Madhep Manthep Mangan Pangane Dhewe”* (Siap dan mantap dengan makanan yang dihasilkan sendiri). Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kabupaten Kulon Progo, dan memberikan nilai tambah bagi para petani produsen pangan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

C. Implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi yang dimiliki masyarakat Kulon Progo. Ada beberapa program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mempromosikan produk – produk unggulan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM ToMiRa

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo melakukan pemberdayaan melalui 3 aspek, diantaranya yaitu:

a. Aspek Kelembagaan

Pada aspek ini berkaitan dengan izin mendirikan UMKM, membina koperasi yang ada di Kulon Progo, dan membuka peluang pasar agar para UMKM bisa bermitra dengan pengusaha besar. Salah satunya adalah menjalin kerjama dengan ToMiRa yang bermitra dengan Alfamart dan Indomaret. ToMiRa menyediakan ruang untuk produk – produk lokal Kulon Progo sebanyak 20 %.

“Jika produknya ingin dipasarkan ke ToMiRa harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh masing – masing Koperasi. Hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM adalah kemasan produknya, mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan komposisinya harus dijelaskan terbuat dari bahan apa saja” (wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

Pemerintah daerah mengikuti Pasal No. 16 tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan perlindungan pemberdayaan Koperasi dan UMKM khususnya terkait dengan kemitraan. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 sekitar 39 ribu sedangkan jumlah ToMiRa hanya ada 19 gerai.

“Harapan kedepannya agar para koperasi dapat mengelola ToMiRa secara mandiri agar jumlah produk lokal yang dipasarkan di ToMiRa dapat meningkat tanpa adanya batas 20% di setiap ToMiRa” (wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

b. Aspek Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan SDM

Aspek ini membahas mengenai sumber daya manusia (SDM) dengan cara pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan potensi para pelaku UMKM, terutama pelatihan yang bersifat manajerial maupun yang bersifat vokasional seperti bagaimana

cara mengolah produk kopi atau mengolah tas rajut dan produk-produk yang lainnya. Pemberdayaan yang ditujukan pada masyarakat harus sudah memiliki potensi baik dalam bentuk kelompok ataupun individu.

Kabupaten Kulon Progo mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti pada produk gula semut yang merupakan gula khas dari Kabupaten Kulon Progo yang dapat diolah menjadi permen atau kue yang berbasis gula semut, karena jika dibandingkan dengan gula tebu maka gula semut secara kandungannya lebih sehat. Jika dari aspek pemberdayaan usahanya pemerintah mengadakan pelatihan bimbingan teknologi dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dan kemampuan dalam berwirausaha. Pemerintah juga mendatangkan pemateri dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk memfasilitasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan tujuan agar produknya memiliki legal berdasarkan hukum agar tidak ada yang menyerupai.

“Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo menginginkan produk UMKM nya berkembang” (wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

Pemerintah mendorong agar setiap produk UMKM memiliki standar Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, masalahnya hanya sebagian kecil saja UMKM yang memenuhi standar halal MUI atau BPOM, minimal setiap UMKM memiliki ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan agar produknya terjamin kualitasnya.

c. Aspek Permodalan

Aspek permodalan ini pemerintah sendiri masih minim anggaran jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah hanya memfasilitasi modal

pinjaman melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi dengan bunga sekitar 4-7 persen. Pemerintah Daerah juga bermitra dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) melalui Program Kemitraan Bela Lingkungan (PKBL), dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank-bank yang ada di Kabupaten Kulon Progo seperti Bank BPD DIY dan Bank BRI.

“Kriteria yang mendapatkan pinjaman, para pelaku UMKM minimal sudah menjalankan usaha bisnisnya sekitar 6 bulan usaha, ada aspek kelayakan bisnis yang dinilai seperti kepadanya usahanya akan gimana, dan kemampuan mengembalikan uang pinjamannya seperti apa. Tidak bisa kalo hanya sebatas rencana mendirikan usaha bisa mendapatkan pinjaman modal, karena dari lembaga simpan pinjam yang didatangkan oleh pemerintah ingin sama-sama untung dan tidak macet dalam pembayaran utang”(wawancara dengan Sri Wahyuniarto, 20 November 2019).

Dengan adanya ToMiRa memberikan kesempatan untuk produk lokal UMKM untuk bisa sejajar penjualannya dengan produk – produk yang biasa ada di Toko Modern. Inovasi ToMiRa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari spirit Gerakan Bela Beli Kulon Progo, hal ini sebagai momentum untuk memberdayakan UMKM sebagai representasi dari gerakan ekonomi kerakyatan.

2. Pemberdayaan Pengrajin Motif Batik Geblek Renteng

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pembinaan dan pengembangan para pengrajin Motif Batik Geblek Renteng, diantaranya adalah:

a. Kegiatan Peningkatan Legalitas

Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk UMKM Batik. Materi yang

disampaikan meliputi pengertian dan manfaat HAKI serta bagaimana caranya mendaftarkan HAKI. Pendaftaran HAKI sangat penting sebagai hak paten yang dimiliki UMKM Batik, jika produk batik sudah mendapatkan izin HAKI akan memiliki keunikan, potensi, dan mampu berkembang secara luas. Seperti halnya mengenai izin HAKI kepada Paguyuban Batik Lendah dengan tujuan agar masyarakat semakin mudah mengenali produk-produk dari Kelompok Batik Lendah.

b. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan UMKM Batik

Kegiatan ini berupa bimbingan mengenai pengembangan bisnis dengan mengadakan seminar kewirausahaan, peningkatan kualitas produk UMKM Batik, dan mengikutsertakan UMKM Batik pada acara pameran dan lomba pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

c. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM Batik

Pemerintah membuka peluang agar para pelaku UMKM Batik dapat mengembangkan pasarnya secara lebih luas, seperti pemerintah membuka pasar untuk para pengrajin batik dengan mewajibkan para siswa dari SD – SMA untuk memakai Batik Motif Geblek Renteng, mempersilahkan kepada para pelaku UMKM Batik untuk memasukan produknya ke Bandara yang baru saja dibangun, yaitu New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, dan bisa juga berpartisipasi mengikuti lelang distributor seragam Batik Motif Geblek Renteng, yang diadakan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan dari dinas – dinas pemeritahan Kulon Progo.

d. Inovasi untuk Pengembangan UMKM Batik

Pemerintah mendorong agar para pengrajin batik untuk berkreasi dengan karya – karyanya untuk menarik konsumen lebih luas. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, ketika pengrajin batik tidak banyak kreasi,

tidak banyak inovasi, dan hanya dengan karyanya yang itu-itu saja, tentu akan ditinggalkan oleh konsumen. Kecamatan Lendah merupakan daerah sentra batik yang kini kerajinan batik di daerah tersebut berkembang begitu pesat, seiring dengan adanya gerakan Bela Beli Kulon Progo.

Dengan adanya gerakan Bela Beli Kulon Progo dapat mengangkat popularitas Batik Geblek Renteng. Pada saat ini batik produk Kulon Progo khususnya Batik Geblek Renteng telah dikenal oleh masyarakat secara luas dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para pengrajin batik pada umumnya.

3. Pemberdayaan Petani Kulon Progo

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) terutama yang mempunyai unit usaha beras daerah. Pendampingan yang diperhatikan terutama pada aspek produksi dan pemasaran. Strategi untuk produksi beras daerah (Rasda) dan Beras PNS adalah pemerintah melakukan bimbingan, pengawasan, dan penerapan teknologi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas beras daerah yang didistribusikan ke Bulog untuk keluarga miskin, dan Beras PNS supaya sesuai dengan standar produksi beras pada umumnya, yang kemudian dapat meningkatkan pemasaran Beras PNS di Kulon Progo.

Keputusan Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188/1679 Tahun 2016 mengenai Teknis Pemenuhan Standar Mutu Beras Daerah Kabupaten Kulon Progo diterbitkan sebagai pedoman standar mutu beras daerah untuk peningkatan kualitas beras yang akan didistribusikan. Peningkatan kualitas standar mutu beras dibantu pemerintah daerah dengan mengadakan fasilitas serta pemberdayaan Gapoktan untuk produksi beras dari mulai panen sampai pengemasan.

Adanya dukungan fasilitas dan dana untuk pemberdayaan dari Pemerintah Daerah ini akan meningkatkan kualitas pengemasan beras dengan bertuliskan merk dari Gapoktan Kulon Progo. Setiap Gapoktan di setiap Desa berpartisipasi dalam pendampingan yang diadakan oleh Dinas Pertanian. Pada tahun 2017 Dinas Pertanian menyediakan modal ke 6 Gapoktan yang menyediakan Beras daerah dalam bentuk uang tunai.

“Pada tahun 2017 kalo tidak salah dinas pertanian menyediakan modal ke 6 Gapoktan yang menyediakan Beras daerah dalam bentuk uang tunai sekitar 1,9 milyar untuk 6 Gapoktan”. (wawancara dengan Retno Setyaningsih, 27 November 2019).

Gapoktan yang diberikan modal oleh pemerintah adalah Gapoktan yang memiliki unit usaha beras daerah, dan kriteria yang mendapatkan modal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tergantung pada kapasitas produksi beras daerah. Pada tahun 2019, Gapoktan dan Kelompok Tani di Kulon Progo yang bekerjasama sebagai pelaksana distribusi Beras Daerah dan Beras PNS, total ada 10 Gapoktan dan 2 Kelompok Petani yang ikut berpartisipasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Gapoktan dan Kelompok Tani distributor Rasda dan Beras PNS

No	Nama Gapoktan / Poktan	Alamat
1	Gapoktan Among Tani	Kedundang, Temon
2	Gapoktan Panca Manunggal	Sogan, Wates
3	Gapoktan Ngesti Raharjo	Ngestiharjo, Wates
4	Gapoktan Sidomaju	Cerme, Panjatan
5	Kelompok Tani Sutera	Pedukuhan XII, Krembangan
6	Kelompok Tani Sedyo Rukun	Karangsewu, Galur
7	Gapoktan Cipta Boga	Kranggan, Galur
8	Gapoktan Sumber Makmur	Srikayangan, Sentolo

9	Gapoktan Rukun Makaryo	Sukoreno, Sentolo
10	Gapoktan Makmur Sejahtera	Tuksono, Sentolo
11	Gapoktan Sari Mulyo	Kedungsari, Pengasih
12	Gapoktan Karya Sejahtera	Jatisarone, Nanggulan

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (2019)

Program Raskin menjadi Rasda dan kebijakan pemerintah mewajibkan PNS untuk membeli beras sebanyak 5kg / bulan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal dengan meningkatkan perputaran uang di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, secara bertahap selalu ada peningkatan nilai rupiah yang beredar.

Tabel 4.2 Bentuk Pemberdayaan Program Bela Beli Kulon Progo

No	Nama Program	Bentuk Pemberdayaan
1	Toko Milik Rakyat (ToMiRa)	a. Aspek Kelembagaan b. Aspek Pemberdayaan Usaha dan SDM c. Aspek Permodalan
2	Motif Batik Geblek Renteng	a. Peningkatan Legalitas b. Pelatihan dan Pengembangan UMKM Batik c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM Batik d. Inovasi Pengembangan UMKM Batik
3	Rasda dan Beras PNS	a. Aspek Produksi dan Pemasaran b. Peningkatan Kualitas Standar Mutu Beras c. Dukungan Fasilitas dan Dana

Sumber: Dinas UMKM dan Dinas Pertanian Kulon Progo (2019)

Bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas UMKM dan Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat Kulon Progo, khususnya pelaku UMKM lokal, pengrajin Batik Motif Geblek Renteng, dan petani beras daerah. Menurut pernyataan dari pelaku UMKM lokal, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang masyarakat alami, terutama pada aspek kelembagaan, pemberdayaan usaha dan SDM serta aspek permodalan.

“Pemerintah memberikan pendampingan pada aspek kelembagaan dengan cara memfasilitasi izin usaha seperti PIRT, Halal MUI, dan HAKI dengan gratis dan kuota UMKM nya terbatas” (wawancara dengan Fachri Yusuf Maulidani, 22 November 2019)

“Pemerintah sendiri memberikan pelatihan pada aspek pemberdayaan usaha, dan sdm dengan cara menyampaikan materi dalam bentuk penyampaian ilmu dan informasi mengenai penanaman kopi hingga pasca panen, karena dalam menanam kopi dari kebun ke biji harus sesuai dengan standar dan tidak semua dipahami oleh petani. Kalo bantuan modal dari pemerintah dalam bentuk barang seperti grinder, coffe maker espresso dan etalase” (wawancara dengan Marwiyah, 27 November 2019).

Selanjutnya, pernyataan dari pengrajin Batik Motif Geblek Renteng, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang mereka alami, terutama pada peningkatan legalitas, pengembangan produk Batik, pengembangan jaringan kerjasama, dan inovasi pengembangan corak Batik Motif Geblek Renteng.

“Kalo dari pemerintah sendiri melakukan pemberdayaan pada aspek peningkatan legalitas, seperti ada pendampingan mengenai Hak

Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada Paguyuban Batik Lendah dengan tujuan agar masyarakat semakin mudah mengenali produk-produk dari Kelompok Batik Lendah” (wawancara dengan Umbuk Haryanto, 22 November 2019).

“Pada aspek pengembangan UMKM Batik, bahwa pemerintah mengadakan seminar mengenai kewirausahaan meliputi jual beli online dengan cara mendatangkan pemateri yang berkompeten di bidangnya. Antusiasnya lumayan banyak karena para pengrajin pada dasarnya ingin berkembang usahanya” (wawancara dengan Hanang Mintarta, 22 November 2019).

“Kalo dari pemerintah sendiri mengembangkan jaringan kerjasama UMKM Batik dengan memberlakukan siswa memakai Batik Motif Geblek Renteng, Kalo untuk Batik Motif Geblek Renteng saya bikin untuk SD dan SMP. Untuk pelatihan inovasi desain batik dengan adanya pelatihan membatik, desain batik, pewarnaan dan banyak lainnya. contohnya seperti pelatihan mengenai corak warna alam, kalo saya sendiri menggunakan corak warna sintetis” (wawancara dengan Darminto, 22 November 2019).

Pernyataan dari petani beras khususnya, pada penelitian ini adalah dari unit usaha beras daerah Gapoktan Sido Maju, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang dialami, terutama pada aspek produksi dan pemasaran, peningkatan kualitas standar mutu beras, serta dukungan fasilitas dan dana.

“Pada aspek produksi dan pemasaran, pemerintah memfasilitasi Gapoktan untuk memasok beras daerah untuk Raskin dan PNS. Untuk peningkatan kualitas mutu beras, pemerintah memberikan bibit padi

dan memberikan anggaran modal ke Gapoktan disini sekitar 200 juta dan pemberian fasilitas alat-alat untuk menunjang kegiatan para petani” (wawancara dengan Sukirman, 20 November 2019).

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat Kulon Progo mengenai pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Maka dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan dapat disimpulkan bahwasannya, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki data yang valid sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat Kulon Progo, khususnya masyarakat yang terdampak dalam program – program Bela Beli Kulon Progo seperti para Pelaku UMKM ToMiRa, Pengrajin Batik Geblek Renteng, dan Petani Kulon Progo.

D. Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kulon Progo

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan indikator teori kemandirian ekonomi dari Benny Susetyo (2016), untuk mengukur kemandirian ekonomi masyarakat Kulon Progo yang terdampak dari kebijakan Bela Beli Kulon Progo, khususnya pada Pelaku UMKM lokal, Pengrajin Batik Geblek Renteng, dan Petani Kulon Progo. Seseorang dapat dikatakan secara mandiri dalam ekonomi apabila telah memenuhi lima aspek ini, diantaranya adalah:

1. Bebas Utang Konsumtif

Utang konsumtif merupakan utang yang jika digunakan tidak akan menambah penghasilan, seperti membeli alat elektronik dan sejenisnya untuk mengikuti gaya hidup. Sedangkan, utang produktif merupakan utang yang digunakan untuk kebutuhan yang dapat menghasilkan keuntungan. Pada penelitian ini, penyusun tidak menemukan masyarakat Kulon Progo yang memiliki utang konsumtif. Namun, untuk memenuhi kelangsungan usahanya ada beberapa pelaku usaha yang penyusun

wawancarai memiliki utang produktif yang biasanya diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman modal usaha.

2. Memiliki Keyakinan dalam Bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan dalam bisnis akan konsisten dalam bisnisnya, baik ketika sedang naik atau sedang sepi. Pelaku usaha akan terus memantau bisnisnya agar tidak memproduksi barang yang kurang penting.

a. Pelaku UMKM ToMiRa

Para pelaku UMKM lokal yang penyusun wawancara sudah bisa memasukan produknya ke ToMiRa, karena sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh koperasi yang menaungi ToMiRa.

“Cokelat Makaryo memasukan produknya ke 7 ToMiRa dengan cara menawarkan produknya ke koperasi yang menaungi ToMiRa. Setelah masuk ToMiRa dari segi pendapatan sangat berpengaruh, Setiap produk Coklat Makaryo yang ada di ToMiRa ada yang reatif cepat habis produknya ada juga yang cenderung lambat” (wawancara dengan Fachri Yusuf Maulidani, 22 November 2019).

Para pelaku UMKM yang produknya berhasil masuk ToMiRa merasakan dampak positif dengan adanya ToMiRa, karena dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha. Para pelaku UMKM ini tidak hanya memasarkan produknya ke ToMiRa saja melainkan ke beberapa toko swalayan lain dan pemasaran lewat media online.

“Produk Stik Growol ini sudah dijual online banyak peminat dari kota Jogja, Jawa Tengah, Kalimantan, Papua, dan bahkan bisa sampai ekspor ke Kuala Lumpur. Produk ini juga sudah dipasarkan lewat Bukalapak. Pemasarannya dibuat dengan dua kemasan, pot dan kardus dengan merek Goku”. (wawancara dengan Desti Puji Lestari, 20 November 2019).

Secara aktifitas perekonomian, para pelaku UMKM ToMiRa yang penulis wawancarai bisa dikatakan memiliki keyakinan dalam bisnis, karena pangsa pasarnya luas dan konsisten dalam memproduksi produk.

b. Pengrajin Batik Geblek Renteng

Para pengrajin batik di Kabupaten Kulon Progo merasa terbantu dengan adanya kebijakan mengenai Motif Batik Geblek Renteng. Sebelum adanya kebijakan Bela Beli Kulon Progo, para pengrajin batik di Kulon Progo hanya beberapa puluh saja, setelah adanya kebijakan tersebut para pengrajin batik Kulon Progo yang dulunya berada di Yogyakarta, berpindah untuk melanjutkan usahanya di Kulon Progo

Pengrajin di Kabupaten Kulon Progo merasa beruntung memiliki motif batik Geblek Renteng karena dapat memperkuat pasar lokal. Biasanya tidak sedikit sekolah yang memesan seragam batik Geblek Renteng pada saat mulai ajaran baru. Jika untuk distribusi batik di dinas pemerintah, para pengrajin batik Geblek Renteng di Kulon Progo mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah daerah, nantinya pemerintah menunjuk UMKM Batik yang mampu memproduksi seragam batik Geblek Renteng untuk dipakai di dinas – dinas pemerintahan daerah.

“Untuk di Darminto Batik, saya bikin untuk TK, SD, dan SMP. Kalo SMA saya belum pernah karena beda sendiri warnanya. Cuman saya tidak terlalu tergantung pada orderan itu.” (wawancara dengan Darminto, 22 November 2019).

Ada juga pengrajin batik motif Geblek Renteng yang penjualan batiknya belum pernah menawarkan ke sekolah – sekolah dan dinas – dinas pemerintahan. Penjualan motif batik Geblek Renteng khususnya di Batik Banyu Sabrang lebih ke secara perorangan yang memang tertarik pada motif nya yang unik.

“Batik Banyu Sabrang belum pernah kebagian mendistribusikan Batik Geblek Renteng ke Dinas – Dinas Pemerintahan dan belum pernah

ada kerjasama dengan siswa SD – SMA untuk membuat seragam batik. Kalo disini jual batik Geblek Renteng hanya ke perorangan saja, karena banyak juga yang cari motif batik Geblek Renteng yang bentuknya seperti angka delapan, secara langsung dapat membantu meningkatkan omset penjualan.” (wawancara dengan Hanang Mintarta, 22 November 2019).

Para pelaku UMKM Batik yang penulis wawancarai secara aktifitas perekonomian memiliki keyakinan dalam menjalankan usaha menjadi pengrajin batik di Kulon Progo, semenjak adanya kebijakan yang memberlakukan Siswa dan PNS untuk memakai Batik Geblek Renteng pada hari kamis. Hal tersebut memberi dampak positif dan membuka peluang pasar bagi pengrajin batik di Kulon Progo.

c. Petani Kulon Progo

Para petani di Kulon Progo merasa terbantu dengan adanya program merubah Raskin menjadi Rasda dan Bela Beli Beras PNS, karena dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, Pemerintah Daerah memberikan kepedulian yang besar bagi petani Kulon Progo melalui Gapoktan dan Kelompok Tani. Kebijakan Raskin menjadi Rasda dan Beras PNS memiliki tujuan untuk memprioritaskan hasil pertanian dari Kulon Progo, dan jangan ada petani yang mengeluh karena hasil pertaniannya tidak terjual. Hal ini terjadi semenjak adanya kebijakan “Bela-Beli Kulon Progo”.

Pemerintah juga memberikan modal ke Gapoktan yang memiliki unit usaha beras, dan jumlahnya bervariasi tergantung pada aspek kapasitas produksinya. Berikut ini jumlah pasokan beras per bulan yang ditujukan untuk Beras Raskin atau BPNT, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Pasokan Rasda dari Gapoktan Kulon Progo tahun 2019

No	Gapoktan/Poktan Pemasok	Rata – Rata Pasokan Per Bulan (Kg)
1	Gapoktan Among Tani	27,736
2	Gapoktan Panca Manunggal	45,172
3	Gapoktan Ngesti Raharjo	30,975
4	Gapoktan Sidomaju	29,852
5	Kelompok Tani Sutera	21,946
6	Kelompok Tani Sedyo Rukun	22,385
7	Gapoktan Cipta Boga	26,561
8	Gapoktan Sumber Makmur	26,343
9	Gapoktan Rukun Makaryo	36,178
10	Gapoktan Makmur Sejahtera	29,921
11	Gapoktan Sari Mulyo	16,044
12	Gapoktan Karya Sejahtera	17,902
	Jumlah Rata – Rata Kab/Bulan	331,013

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (2019)

Berdasarkan hasil data yang disajikan penulis diatas bahwa setiap bulannya Pemerintah Daerah bersama Gapoktan telah berusaha mewujudkan pemenuhan beras untuk Raskin atau BPNT, jumlahnya pun bervariasi tergantung kapasitas Gapoktan dalam produksi berasnya. Meskipun, dari 88 Gapoktan di Kabupaten Kulon Progo hanya 10 Gapoktan dan 2 Kelompok tani saja yang terlibat menjadi distributor beras daerah.

Dampak dengan adanya kebijakan tersebut, membuat para petani di Kabupaten Kulon Progo termotivasi untuk terus memproduksi beras tanpa takut tidak laku penjualan berasnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepastian bagi para petani yang tergabung dalam Gapoktan akan terjual berasnya serta membuat petani di Kulon Progo semakin yakin untuk

melanjutkan profesinya sebagai petani padi. Selain itu, program ini membuat petani merasa diperhatikan oleh pemerintah.

3. Memiliki Investasi

Investasi yaitu menanamkan modal dengan harapan nantinya modal tersebut akan bertumbuh. Modal disini bukan hanya sebatas uang, melainkan pikiran, tenaga, dan lain sebagainya.

a. Pelaku UMKM ToMiRa

Pada pelaku UMKM ToMiRa yang penyusun wawancara, semuanya sudah memiliki perencanaan bisnis kedepannya akan seperti apa, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh pemilik “Coklat Makaryo” bahwa kedepannya akan membuat wisata edukasi coklat.

“Rencana jangka panjangnya untuk produk Coklat Makaryo untuk 5 tahun kedepan saya ingin membuat wisata edukasi cokelat jadi konsepnya ngajarin anak-anak untuk menanam coklat sampai pembuatan coklatnya kita sudah kepikiran namanya adalah “Coklat Institute” tujuannya adalah mengedukasi anak-anak pemahaman proses pembuatan cokelat” (wawancara dengan Fachri Yusuf Maulidani, 22 November 2019).

Berbeda dengan pemilik UMKM Stik Growol yang ingin membuat inovasi baru dari bahan olahan growol agar dapat diterima lebih banyak masyarakat secara lebih luas.

“Untuk kedepannya kami ingin menciptakan Growol dalam bentuk kue pie dan stik oven” (wawancara dengan Desti Puji Lestari, 20 November 2019).

Pernyataan diatas sejalan dengan pemilik Kopi Moka Monoreh yang ingin membuat inovasi baru khususnya dalam kopi agar konsumen tidak bosan dengan produk kami.

“Kedepannya saya akan melengkapi alat pembuatan kopi agar bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan kedepannya akan membuat

inovasi racikan kopi” (wawancara dengan Marwiyah, 27 November 2019).

b. Pengrajin Batik Geblek Renteng

Para pengrajin Batik Geblek Renteng di Kecamatan Lendah yang menyusun wawancarai sudah memiliki perencanaan kedepannya akan seperti apa. Misalnya, seperti pernyataan yang disampaikan oleh pemilik Batik Banyu Sabrang yang ingin membuka cabang baru di daerah Bantul,

“Rencana kedepannya saya ingin membuka cabang di Bantul, karena ingin bersaing dengan para pengrajin batik yang berada di Bantul” (wawancara dengan Hanang Mintarta, 22 November 2019).

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pemilik Darminto Batik yang pada saat menyusun wawancarai, untuk rencana kedepannya sedang dalam proses pindahan ke toko baru yang ukurannya lebih luas dan letaknya masih sama di Kecamatan Lendah.

“Kedepannya saya sedang pindah ke toko baru, cuman masalahnya pembangunan tokonya lagi berhenti karena sedang tidak punya modal untuk membangun”(wawancara dengan Darminto, 22 November 2019)

Pemilik Batik Farras yang sudah lama berada di industri batik Kecamatan Lendah, ingin selalu melakukan inovasi dalam menciptakan batik, karena semenjak ada kebijakan Batik Motif Geblek Renteng banyak bermunculan pengrajin batik baru di Kulon Progo.

“Kedepannya saya akan menciptakan batik dengan kombinasi dan corak yang benar -benar baru” (wawancara dengan Umbuk Haryanto, 22 November 2019).

c. Petani Kulon Progo

Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) yang menyusun wawancarai adalah Gapoktan Sido Maju yang menjadi salah satu

distributor Beras Daerah (Rasda) dan Beras PNS. Gapoktan Sido Maju terkait mengenai perencanaan kedepannya akan mengikuti intruksi dari pemerintah daerah, karena kedepannya pemerintah daerah akan menambah keterlibatan partisipasi Gapoktan untuk menjadi distributor beras daerah. Namun, ada keinginan dari Gapoktan Sido Maju untuk memasarkan beras hasil produksinya ke luar daerah.

4. Mampu Mengelola Keuangan

Sebuah arus kas bisa dinilai baik ketika pengeluaran perorangan ataupun suatu unit usaha lebih sedikit dari pendapatannya, sehingga sisanya bisa ditabung ataupun diinvestasikan.

a. Pelaku UMKM ToMiRa

Pemilik Usaha “Stik Growol” memiliki omset penjualan mencapai puluhan juta dalam waktu satu bulan produksi. Biasanya pada musim menjelang lebaran Idul Fitri, pemesanan produk bisa sampai berkali lipat pada dibanding dengan hari biasanya.

“Omset penjualan disini bisa sampai 10 juta per bulan. Usaha ini ramai pembeli ketikan menjelang Idul Fitri terutama pada saat bulan Ramadhan. Makin banyaknya orderan, usaha ini sampai menolak pesanan karena rumah produksinya tidak menyanggupi” (wawancara dengan Desti Puji Lestari, 20 November 2019).

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang dialami oleh pemilik “Coklat Makaryo” yang sama – sama memiliki omset hingga puluhan juta dalam waktu satu bulan.

“Omset disini perbulan kalo dirata-rata ada pada kisaran 25 sampai 30 juta per bulan. Penjualan disini ramai pada saat bulan Ramadhan terutama menjelang lebaran. Pada saat bulan Ramadhan jika dihitung-hitung bisa memproduksi coklat hingga 12 ribu pcs”. (wawancara dengan Fachri Yusuf Maulidani, 22 November 2019).

b. Pengrajin Batik Geblek Renteng

Ada hal menarik yang penyusun temui ketika melakukan wawancara dengan pengrajin batik khususnya dengan pemilik “Batik Banyu Sabrang” yang menyatakan bahwa tidak terlalu memperdulikan mengenai untung atau rugi, karena pekerjaan menjadi pengrajin batik adalah bagian dari hobi.

“Tidak pernah dihitung pernah mengalami kerugian atau tidak, karena saya memang hobi dalam mengrajin batik, makanya saya tidak terlalu memperdulikan untung atau rugi. Ada beberapa kain yang tidak terjual selama 3 tahun namun masih bisa dijual karena dari segi kualitas masih aman”. (wawancara dengan Hanang Mintarta, 22 November 2019)

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kualitas batik masih bisa diperjualbelikan, meskipun sudah tersimpan dalam kurun waktu 3 tahun. Penjualan Batik ramai ketika pada saat musim liburan karena banyak juga yang singgah ke Butik Batik yang ada di Kecamatan Lendah.

“Penjualan tergantung musim terutama pada musim lebaran, awal masuk sekolah, dan menjelang tahun baru” (wawancara dengan Darminto, 22 November 2019).

c. Petani Kulon Progo

Gapoktan Sido Maju diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah Kulon Progo untuk menjadi distributor Beras Daerah untuk masyarakat penerima manfaat dan Beras PNS. Gapoktan Sido Maju bisa terpilih dikarenakan teruji dalam menjaga kualitas beras dan mampu memproduksi beras dengan skala yang lebih besar. Gapoktan Sido Maju menjadi salah satu Gapoktan yang diberikan modal oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo.

“Pemerintah memberikan anggaran modal ke Gapoktan Sido Maju sekitar 200 juta” (wawancara dengan Sukirman, 20 November 2019)

Bisa dikatakan Gapoktan Sido Maju mampu mengelola keuangan, karena diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk mengelola modal usaha yang jumlahnya sekitar ratusan juta. Diantara 88 Gapoktan yang ada di Kulon Progo, hanya 6 Gapoktan saja yang diberikan modal oleh pemerintah daerah.

5. Memiliki Kesiapan Mental

Aspek mental menjadi sangat penting karena terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Mental seseorang akan mempengaruhi usahanya untuk cepat berkembang dan sukses.

a. Pelaku UMKM ToMiRa

Secara aktifitas perekonomian, para pelaku UMKM ToMiRa yang penulis wawancarai bisa dikatakan sudah memiliki kesiapan mental dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini bisa dikatakan demikian karena para pelaku UMKM ToMiRa ini percaya diri dengan hasil produknya dan beradaptasi dengan perubahan, dengan menjaga ketahanan usahanya bertahun – tahun lamanya dan hingga saat ini memiliki omset per bulan bisa sampai puluhan juta.

b. Pengrajin Batik Geblek Renteng

Para pengrajin Batik telah yang menyusun wawancarai secara aktifitas perekonomian bisa dikatakan memiliki kesiapan mental dalam menjalankan bisnis UMKM Batik. Para pemilik UMKM Batik ini tidak terlalu memikirkan kesalahan dan fokus terhadap solusi yang akan diterapkan. Seperti beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemasaran online untuk penjualan Batik Geblek Renteng. Industri Batik ini dapat membantu warga sekitar untuk mendapatkan

pekerjaan sebagai pengrajin batik dan juga memberikan dampak positif penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo.

c. Petani Kulon Progo

Para petani Kulon Progo merasakan dampak dengan adanya kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Karena membuat mental para petani menjadi lebih bekerja keras dan termotivasi untuk terus memproduksi beras tanpa takut tidak laku penjualan berasnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepastian bagi para petani yang tergabung dalam Gapoktan akan terjual berasnya. Hal ini dirasakan oleh Gapoktan Sido Maju yang membawahi kelompok-kelompok petani dengan keharusan untuk membeli hasil panen petani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut.

Tabel 4.4 Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kulon Progo

No	Kemandirian Ekonomi	Pelaku UMKM ToMiRa	Pengrajin Batik Geblek Renteng	Petani Kulon Progo
1	Bebas Utang Konsumtif	Bebas utang konsumtif dan memiliki utang produktif	Bebas utang konsumtif dan memiliki utang produktif	Bebas utang konsumtif dan memiliki utang produktif
2	Memiliki Keyakinan dalam Bisnis	Memasarkan produknya ke ToMiRa	Memasarkan produk seragam Batik Geblek Renteng Ke Siswa dan PNS di Kabupeten Kulon Progo	Menjadi distributor Rasda untuk keluarga penerima manfaat dan PNS di Kabupaten Kulon Progo

3	Memiliki Investasi	Membuat inovasi produk agar diterima oleh masyarakat luas	Membuat inovasi dalam bentuk kombinasi dan corak yang benar-benar baru	Memasarkan hasil panen berasnya ke luar daerah
4	Mampu Mengelola Keuangan	Mampu menghasilkan hingga puluhan juta dalam kurun waktu satu bulan	Mampu mengelola keuangan ketika kondisi sedang mengalami kerugian	Mampu mengelola modal yang diberikan oleh pemerintah daerah yang jumlahnya ratusan juta
5	Memiliki Kesiapan Mental	Percaya diri dengan produk yang telah dihasilkan	Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dalam memasarkan produk Batik Geblek Renteng	Bekerja keras dalam memanen padi, karena terjamin beras yang dihasilkan oleh petani akan dibeli oleh Gapoktan yang menaungi

Sumber : Analisa Penulis (2019)

E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Ada beberapa aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan antara Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan perspektif Ekonomi Islam yang meliputi empat aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Potensi Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Potensi adalah suatu bentuk kemampuan atau kekuatan yang belum dikembangkan secara optimal. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda – beda, walau demikian potensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak dikembangkan dengan baik dan tepat. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Pada Gerakan Bela Beli Kulon Progo ada beberapa potensi yang dikembangkan dengan tujuan, agar masyarakat Kulon Progo mencintai produk – produk lokal hasil produksi masyarakat Kulon Progo yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Ada beberapa potensi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kulon Progo, diantaranya sebagai berikut:

a. Potensi UMKM Lokal Kulon Progo

Pemerintah memfasilitasi para pemilik UMKM di Kulon Progo dengan mendirikan Toko Modern dengan nama ToMiRa (Toko Milik Rakyat) dengan tujuan untuk memfasilitasi UMKM lokal untuk memasarkan produknya di ToMiRa. ToMiRa memfasilitasi produk – produk lokal sebanyak 20% untuk mengisi ruang yang disediakan oleh ToMiRa. Produk yang dijual oleh UMKM kebanyakan memang berbahan dasar dari Kulon Progo.

b. Potensi Motif Batik Geblek Renteng

Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan memberlakukan para siswa sekolah dari mulai SD – SMA dan PNS di seluruh dinas di Kulon Progo untuk memakai seragam dengan Motif Batik Geblek Renteng setiap hari Kamis. Sehingga, dengan adanya kebijakan ini membuat industri batik di Kulon Progo yang sebelumnya hanya beberapa orang saja berkembang menjadi ribuan pengrajin batik.

c. Potensi Beras Daerah

Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan merubah Raskin yang asal berasnya dari luar negeri menjadi Rasda yang berasnya berasal dari para petani Kulon Progo. Ada juga kebijakan memberlakukan PNS di Kulon Progo untuk membeli beras sebanyak 5 g/bulan. Hal ini tentu membuat para petani terbantu dengan adanya kepastian penjualan dalam produksi beras daerah.

Ekonomi Islam mengakui potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dalam suatu kelompok. Potensi ini diperlukan dalam setiap kelompok yang berbeda sebagai upaya untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bela Beli Kulon Progo yang memfasilitasi masyarakatnya agar potensinya berkembang. Pemerintah daerah memberlakukan program – program yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing kelompok seperti Para Pelaku UMKM, Pengrajin Batik, dan Para Petani Beras.

Setiap potensi di Kulon Progo diberlakukan kebijakan masing – masing potensi kelompok oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi kedengkian antar kelompok masyarakat. Hal ini relevan dengan Ekonomi Islam yang melarang melakukan pelecehan terhadap kelompok lain, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٤٩:١١]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri

dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Hujurat, 49:11).

2. Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatannya dapat berupa keterlibatan mental, emosi, serta fisik dengan menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas semua keterlibatan. Partisipasi yang dibahas pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mengikuti program Bela Beli Kulon Progo. Sebagian masyarakat Kulon Progo ikut terlibat pada program – program Bela Beli Kulon Progo yang diadakan oleh Pemerintah Daerah seperti:

a. Partisipasi UMKM ToMiRa

Para UMKM di Kabupaten Kulon Progo berpartisipasi mengikuti program Bela Beli Kulon Progo dengan memasukan produk – produk lokal unggulannya untuk dipasarkan di ToMiRa. Sehingga, masyarakat Kulon Progo yang ingin membeli produk – produk lokal bisa datang ke ToMiRa. Selain itu, para pelaku UMKM ikut berpartisipasi jika ada kegiatan pendampingan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Karena pada dasarnya UMKM di Kulon Progo menginginkan produknya berkembang.

b. Partisipasi Pengrajin Batik Motif Geblek Renteng

Para Pengrajin Batik Motif Geblek Renteng berpartisipasi dengan memasarkan batiknya untuk seragam siswa dari mulai SD – SMA dan untuk seragam PNS dengan cara mengikuti kegiatan lelang yang diadakan oleh dinas – dinas pemerintahan di Kulon Progo. Selain itu,

bisa memasarkan produk Batik Motif Geblek Renteng ke luar daerah agar orang luar mengetahui produk batik khas Kulon Progo.

c. Partisipasi Petani Beras Daerah

Para petani beras yang tergabung dalam Gapoktan ikut berpartisipasi dalam mendistribusikan beras daerah untuk Raskin atau sekarang disebut dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan turut serta mendistribusikan ke beberapa dinas – dinas Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Dari total keseluruhan 88 Gapoktan di Kulon Progo, hanya 12 Gapoktan yang terlibat dalam mendistribusikan beras daerah ke BPNT dan PNS. Kedepannya pada tahun 2020 ada tambahan 9 Gapoktan yang akan terlibat dalam distribusi beras daerah. Konsep partisipasi dalam Islam sangat penting untuk dilakukan sebagai efek dari pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki dua ukuran yang perlu dilakukan yaitu memberikan manfaat antar masyarakat lain dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu komunitas. Partipasi masyarakat Kulon Progo terutama yang terlibat dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo memberikan manfaat ke warga sekitar sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan adanya program tersebut membuat para pelaku UMKM, Pengrajin Batik, dan Petani banyak menerima pesanan.

Dampak yang diciptakan dengan adanya program Bela Beli Kulon Progo adalah dapat membantu perekonomian warga Kulon Progo dan memberikan manfaat antar masyarakat. Contohnya seperti: Pertama, UMKM ToMiRa misalnya pemilik produk “Coklat Makaryo” dapat memberikan manfaat kepada para petani kakao yang ada di Kulon Progo, karena bahan dasar coklat berasal dari tanaman kakao. Kedua, Pengrajin Batik sekarang di Kulon Progo meningkat hingga ribuan, dikarenakan semenjak adanya kebijakan mengenai Batik Motif Geblek Renteng. Bisa disimpulkan dalam aspek produksi batik produksi Kulon Progo

meningkat dan dapat membantu perekonomian warga sekitar untuk menjadi pengrajin Batik. Ketiga, Para petani di Kulon Progo khususnya Petani Padi sangat terbantu dengan adanya kebijakan Beras Daerah (Rasda). Para Petani Padi tidak gelisah hasil panennya tidak terjual, karena dari pemerintah melalui Gapoktan mau tidak mau harus membeli hasil panen petani di Kulon Progo.

Hal yang dijelaskan diatas dapat membuat masyarakat Kulon Progo, khususnya yang terlibat dalam program Bela Beli Kulon Progo dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi dalam Islam, bahwasannya pemberdayaan pada aspek partisipasi harus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Islam memberikan peluang bagi semua anggota masyarakat yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka sendiri.

Artinya, setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas memiliki kemampuan khusus untuk terlibat dalam suatu komunitas. Partisipasi harus mendapat dorongan dari anggota masyarakat lainnya (Zal, 2012). Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٩:٧١]

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (At-Tawbah: 71).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mendorong anggota masyarakat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat khususnya pada penelitian ini adalah masyarakat Kulon Progo. Ini menunjukkan bahwa Islam mempertimbangkan faktor sosial untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan masyarakat. Islam menjelaskan secara rinci insentif dari setiap peserta dimana dapat ditingkatkan dengan melakukan hal yang sama dan menetapkan tujuan jelas.

3. Tolong Menolong dalam Ekonomi Islam

Tolong menolong dalam bahasa arabnya disebut dengan *ta'awun*. Sedangkan menurut istilah *ta'awun* merupakan sifat tolong menolong diantara sesama manusia terutama dalam hal kebaikan dan takwa. Tidak diperbolehkan tolong – menolong dalam hal melakukan dosa atau permusuhan. Tolong menolong atau *ta'awun* dalam kegiatan program Bela Beli Kulon Progo terdapat dua unsur yang saling menolong satu sama lain. Ada Pemerintah Daerah Kulon Progo sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kulon Progo, dan masyarakat Kulon Progo sebagai pihak yang diberdayakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kulon Progo mengadakan kegiatan pelatihan atau pendampingan kepada masyarakat Kulon Progo dengan tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakatnya serta untuk mengembangkan kualitas hidup warganya. Pendampingan tersebut bisa dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk UMKM, pelatihan untuk mengembangkan corak motif untuk para pengrajin batik, dan pendampingan pada aspek produksi dan pemasaran untuk para petani padi.

Konsep pemberdayaan Islam juga menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan terdapat dua unsur diantaranya yaitu orang atau lembaga yang memberdayakan (Pemerintah Daerah Kulon Progo) dan orang atau kelompok yang diberdayakan (Masyarakat Kulon Progo khususnya

kelompok UMKM, Pengrajin Batik, dan Petani Padi). Dalam Islam, pemberdayaan merupakan proses tolong-menolong seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Al-Maidah, 5:2).

Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan konsep pemberdayaan, bahwa untuk meningkatkan daya orang yang diperdayakan harus dengan cara interaksi dan kerjasama yang baik agar dapat menghasilkan tujuan yang baik. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail mengenai mekanisme pemberdayaan ekonomi, namun perhatian Al-Qur'an pada penanggulangan kemiskinan sangat besar. Hal ini sangat relevan dengan program Bela Beli Kulon Progo yang tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Kulon Progo.

4. Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal – hal mana yang benar dan mana yang salah. Artinya, etika bisnis Islam adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang sangat berkaitan dengan kegiatan bisnis pada suatu usaha. Ada beberapa kesamaan antara kebijakan program Bela Beli Kulon Progo dengan pelaksanaan etika yang sesuai dengan ketentuan syari'ah mengenai persoalan ekonomi dan bisnis, diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Melakukan Penimbunan Barang dengan tujuan untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi (*Ihtikar*)

Pada Program Beras Daerah (Rasda) belum pernah terjadi kasus penimbunan beras dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penimbunan Beras di Kulon Progo dilakukan dengan tujuan untuk

menyimpan persediaan beras untuk pangsa pasar kedepannya, seperti menyediakan beras PNS dan BNPT yang persediaannya harus dipersiapkan selama satu bulan sebelum melakukan pendistribusian.

b. Menyuap Pejabat untuk Mendapatkan Pesanan (*Riswah*)

Pada Program Motif Batik Geblek Renteng, untuk menyediakan seragam Batik Geblek Renteng untuk PNS di Kulon Progo harus melalui mekanisme lelang. Lelang disini maksudnya adalah, Pihak dari Dinas Pemerintahan Kulon Progo membeli Batik Motif Geblek Renteng, dengan cara menunjuk pengrajin batik yang terpilih berdasarkan kesanggupan produksi batik serta corak motif Batik Geblek Renteng yang menarik perhatian para instansi pemerintahan. Sehingga pada proses lelang tersebut ada persaingan dari para pengrajin Batik untuk menawarkan kualitas Batik masing-masing kelompok. Sejauh ini, penulis belum menemukan kasus pengrajin batik menyuap pejabat daerah untuk mendapatkan pesanan Batik Geblek Renteng.

c. Menipu Konsumen dengan Menjual Produk yang Tidak Sesuai dengan yang telah Dicontohkan (*Tadlis*)

Pada kasus UMKM ToMiRa belum pernah ada kejadian penipuan pada produk yang dijual. Karena dari Dinas UMKM mengontrol agar produk – produk UMKM yang dipasarkan di ToMiRa harus memenuhi kualifikasi seperti yang harus diperhatikan adalah pada aspek kemasan produknya, tanggal kadaluarsanya harus dicantumkan, dan yang paling penting adalah komposisinya harus dijelaskan terbuat dari bahan apa saja. Selain dari UMKM ToMiRa, dalam program Beras Daerah juga belum pernah mengalami kasus mengenai beras plastic, karena dari Dinas Pertanian selalu mengontrol beras petani agar memenuhi standar mutu beras.

Pengembangan etika bisnis Islam sebagai bagian dari komitmen para pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih

memiliki perhatian pada berbagai persoalan ekonomi mikro. Jadi dapat ditegaskan bahwasannya pemberdayaan ekonomi Islam berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat, seperti halnya pada program Bela Beli Kulon Progo yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Tabel 4.5 Pemberdayaan dalam program Bela Beli perspektif Ekonomi Islam

No	Aspek Pemberdayaan dalam Ekonomi Islam	ToMiRa	Batik Motif Geblek Renteng	Rasda dan Beras PNS
1	Potensi	ToMiRa memberi ruang 20% untuk UMKM lokal menjual produknya	Siswa sekolah dari SD – SMA dan PNS di Kulon Progo diwajibkan memakai Batik Geblek Renteng setiap hari kamis	Distributor Raskin (Beras luar daerah) menjadi Rasda (Beras daerah) dan PNS di Kulon Progo dihibmabau membeli beras daerah sebanyak 5 kg per bulan
2	Partisipasi	UMKM lokal memasarkan produknya di ToMiRa	Pengrajin Batik Motif Geblek Renteng memasarkan batiknya untuk seragam siswa sekolah dan PNS di Kulon Progo	Petani yang tergabung dalam Gapoktan mendistribusikan Rasda untuk penerima manfaat dan PNS di Kulon Progo

3	Tolong Menolong	Pemberdayaan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo kepada UMKM di Kulon Progo	Pemberdayaan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo kepada Pengrajin Batik di Kulon Progo	Pemberdayaan ekonomi oleh Dinas Pertanian dan Pangan kepada petani padi yang tergabung kedalam Gapoktan di Kulon Progo
4	Etika Bisnis	UMKM lokal tidak melakukan penipuan (<i>tadlis</i>) kepada konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai.	Pengrajin Batik Motif Geblek Renteng tidak melakukan perbuatan menyuap pejabat daerah (<i>Riswah</i>) untuk mendapatkan pesanan seragam Batik Motif Geblek Renteng.	Para petani padi yang tergabung dalam Gapoktan tidak pernah melakukan penimbunan beras (<i>Ihtikar</i>) untuk mendapatkan keuntungan.

Sumber : Analisa Penulis (2019)

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasannya Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan implementasi dari visi dan misi yang sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kulon Progo 2011 – 2016. Secara keseluruhan,

program – program Bela Beli Kulon Progo yang dibahas oleh penulis memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan penguatan ekonomi lokal Kulon Progo dan menyejahterakan masyarakat.

Program ToMiRa dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. Adapun sasaran dari program ToMiRa ini adalah koperasi – koperasi yang ada di Kulon Progo, para pelaku UMKM Kulon Progo, dan seluruh masyarakat Kulon Progo. Program ToMiRa merupakan bagian dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo karena memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk lokal dan memberikan perlindungan kepada pasar tradisional.

Program Batik Geblek Renteng pelaksanaannya berdasarkan dengan adanya Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 025/2171, 2 Juli 2012 mengenai Penggunaan Pakaian Batik Motif Geblek Renteng. Program Batik Geblek Renteng memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pengrajin batik, meningkatkan promosi batik lokal, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun sasaran dari Program Batik Geblek Renteng adalah masyarakat pengrajin Batik serta seluruh masyarakat Kulon Progo.

Program Rasda (Beras Daerah) dan Program Beras PNS dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan “*Madhep Manthep Mangan Pangane Dhewe*” (Siap dan mantap dengan makanan yang dihasilkan sendiri). Tujuan Program Rasda dan Beras PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kulon Progo. Program Rasda merupakan perwujudan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakann kebijakan di bidang pangan. Sedangkan, Beras PNS

merupakan kebijakan dari Bupati Kulon Progo melalui Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/5231 Tahun 2015 menghimbau seluruh PNS di Kulon Progo untuk membeli Beras “SEHAT” hasil produksi Gapoktan di Kulon Progo. Adapun sasaran dari Program Rasda dan Beras PNS adalah para petani di Kulon Progo, masyarakat penerima Rasda, PNS Kulon Progo, dan seluruh masyarakat Kulon Progo.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, ada beberapa aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan antara Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan ekonomi Islam. Pertama, Potensi Masyarakat Kulon Progo dalam Ekonomi Islam sebagai upaya untuk berkembang dan tidak boleh menghinakan potensi kelompok lain. Kedua, Partisipasi Masyarakat Kulon Progo dalam Ekonomi Islam memberikan manfaat antar kelompok masyarakat Kulon Progo dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kulon Progo. Ketiga, Tolong Menolong dalam Ekonomi Islam merupakan proses pemberdayaan yang memiliki dua unsur, diantaranya ada lembaga yang memberdayakan atau Pemerintah Daerah Kulon Progo dan kelompok yang diberdayakan atau masyarakat Kulon Progo. Keempat, Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam tidak diperbolehkan melakukan penimbunan barang, menyuap pejabat untuk mendapatkan pesanan, dan menipu konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Susilo (2016) menjelaskan bahwa, kendala utama dari pengembangan implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo adalah ada pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat pada program tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan pemberdayaan ke masyarakat Kulon Progo, terutama pada pelatihan mengenai kewirausahaan online ada beberapa masyarakat yang sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan. Dikarenakan, ada beberapa masyarakat yang mengalami

penyakit Gaptex (Gagap Teknologi) yang belum begitu mengetahui dunia internet. Masalah Gaptex masyarakat Kulon Progo rata – rata dipengaruhi oleh faktor usia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianto (2015) terutama pada partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo, bahwasannya partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang sudah kelihatan ada akan tetapi belum optimal, dikarenakan hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang terlibat dalam program Bela Beli Kulon Progo. Penulis sepakat dengan hasil penelitian tersebut bahwasannya partisipasi masyarakat kurang optimal. Pada penelitian ini ruang lingkungannya lebih luas yaitu partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianto (2015) yaitu partisipasi masyarakat Kalibawang.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo tidak semua kelompok yang terlibat pada Gerakan Bela Beli Kulon Progo, contohnya seperti pada program Rasda dan Beras PNS yang terlibat dalam distribusi beras daerah hanya 12 Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani). Sedangkan, di Kulon Progo sendiri di setiap desa ada Gapoktan, yang jumlah desanya ada 88 desa berarti ada 88 Gapoktan di Kulon Progo. Pada Program ToMiRa, Partisipasi UMKM lokal yang memasukan produknya ke ToMiRa hanya beberapa puluh saja. Sedangkan, jumlah UMKM di Kulon Progo bisa sampai tiga ribu. Begitu juga dengan partisipasi pengrajin batik Geblek Renteng, yang tidak semua pengrajin terlibat pada pendistribusian seragam Batik Geblek Renteng, untuk Siswa Sekolah dan PNS di Kulon Progo. Atas dasar permasalahan partisipasi yang sudah dijelaskan penulis, bahwa perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi program dan mendampingi masyarakat Kulon Progo yang ingin terlibat pada program Bela Beli Kulon Progo.

Selanjutnya, ada penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal (2011) yang menyatakan bahwa Ekonomi Islam mempunyai tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi untuk semua orang harus berlandaskan pada norma dan etika. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis menganalisis program Bela Beli Kulon Progo dalam perspektif ekonomi Islam kedalam empat aspek, diantaranya ada potensi masyarakat, partisipasi masyarakat, tolong menolong (*ta'awun*), dan etika bisnis Islam. Sedangkan Rizal (2011) dalam penelitiannya mensinergikan ekonomi Islam dengan ekonomi kerakyatan yang secara landasan hampir serupa.

